



LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
T: +62 2648224794 F: +62 2648224794
www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala DPMPTSP dengan Bupati Purwakarta untuk dicapai dalam periode Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memuat tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu. Perjanjian Kinerja secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun
2.	Mingkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 Poin

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja instansi pemerintah harus

selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. HK.01/Kep.58-DPMPTSP/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan telah diperjanjikan melalui dokumen perjanjian kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah untuk dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan.

B. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Capaian kinerja DPMPTSP Purwakarta Tahun 2023 merupakan capaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja berdasarkan penetapan indikator kinerja utama Tahun 2023. Perhitungan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan sehingga apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75	97,72	130,29%
2	Mingkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	91,12	110,45%

2. Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	97,72	75	130,29%
2	Mingkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,12	82,5	110,45%

3. Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ kota Lain

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	130,29%	102,00%	127,74%

No	Tujuan/	Indikator			%Capaian
----	---------	-----------	--	--	----------

	Sasaran	Kinerja	Realisasi 2023	Standar Provinsi	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	130,29%	112,01%	116,32%

4. Perbandingan dengan Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	4	4	5	6
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70	82,83	118,33%	75	97,72	130,29%
2	Mingkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45	91,26	110,69%	82,5	91,12	110,45%

5. Pengukuran Indikator Kinerja Individu yang berdampak terhadap Indikator Kinerja Kunci.

No	Nama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Ir. H. YADI HERYADI, MT	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75	97,72	130,29%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	91,12	110,45%
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	AA	125,00%
2	ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75	97,72	130,29%
3	RADEN HERI LUKMAN, SH	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75	97,72	130,29%
4	Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.	Presentase Data dan Sistem Informasi yang dimutakhirkan	100%	100%	100,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	91,12	110,45%
5	OCTIVIANI, SP.M.Tr.A.P	Prosentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diselesaikan	1	1	100,00%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	91,12	110,45%

6	ENDANG SRI LESTARI, SE	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	100,00%
		Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana	100%	100%	100,00%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00%
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00%
7	HJ. N. CAHYANI ALANI, SE	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan	90%	95%	105,56%
8	INSAN ABDILLAH WINANDAR	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan	90%	95%	105,56%
		Persentase ketersediaan data kinerja OPD.	100%	95%	95,00%
9	R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos	1. Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	1	1	100,00%
10	ARIF MARTANTO ST., MT.	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	1	1	100,00%
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	1	1	100,00%
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota	1	0	0,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten/kota	1	2	200,00%
11	DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	2	2	100,00%
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	500	600	120,00%
		Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	1	1	100,00%
12	METTA RATNA MUSTIKA, SE	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	520	648	124,62%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	82,5	91,12	110,45%

		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non Perizinan Penanaman Modal.	100	126	126,00%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah	5	2	40,00%
13	KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M,Tr.AP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200	270	135,00%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80	80	100,00%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	80	67	83,75%
14	H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	520	648	124,62%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	82,5	91,12	110,45%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non Perizinan Penanaman Modal.	100	126	126,00%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah	5	2	40,00%
15	RYAN ERVIANDI, ST	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	520	648	124,62%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	82,5	91,12	110,45%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non Perizinan Penanaman Modal.	100	126	126,00%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah	5	2	40,00%
16	LINGGA KENCANAN, S.Pd	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat	50	38	76,00%

		terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan		
--	--	--	--	--

B. PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN

1. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Dalam rangka melaksanakan perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan capaian yang telah ditetapkan, DPMPTSP telah didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan DAK Non Fisik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Matrikulasi pemanfaatan anggaran terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Program tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan :
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan (empat) sub kegiatan :
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel pengukuran capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, subkegiatan dapat dilihat pada tabel capaian berikut ini :

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi	
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.445.900	97,23	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.436.000	94,36	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	20.686.200	68,95	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.592.759.615	6.676.161.263	87,93	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.626.000	7.562.000	99,16	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	8.090.400	80,9	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	17.100.000	85,5	100,00

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136.300.000	58.500.000	42,92	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	79.150.000	98,94	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.925.300	99,85	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.102.930	26.901.400	47,11	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	287.733.600	231.322.982	80,39	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.962.000	107.685.100	86,17	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	5.950.000	99,17	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	144.775.336	96,52	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.994.000	24.794.000	99,2	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	100.000.000	0	0,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	199.243.000	56,93	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	7.000.000	41,18	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	617.389.000	506.872.447	82,1	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.187.399.608	1.957.369.026	89,48	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	118.000.000	94.434.545	80,03	100,00

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	30.000.000	100	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.509.000	99,67	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.770.000	83.570.000	99,76	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.000.000	346.344.000	65,97	100,00
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	80.000.000	69.737.100	87,17	100,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000	42.550.000	96,7	100,00
10	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	110.000.000	10.000.000	9,09	100,00
11	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100.000.000	98.224.000	98,22	100,00
12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55.000.000	54.274.800	98,68	124,00

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.000.000	54.414.800	68,02	126,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.990.600	17.371.400	57,92	76,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.000.000	4.306.957	43,07	40,00
13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	112.900.000	112.090.500	99,28	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	228.000.000	226.000.000	99,12	135,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	66.000.000	57.913.530	87,75	83,25
14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	226.818.200	169.425.790	74,7	100,00
	TOTAL	13.928.745.553	11.778.136.776	84,56	99,14

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah laporan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta yang telah diperjanjikan oleh kepala unit tertinggi sampai kepala unit terendah pada Tahun 2023. Laporan Kinerja memuat tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yang terdiri dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dan 41 (Empat Puluh Satu) Indikator Kinerja Subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kunci.

Dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang telah diperjanjikan, kedua indikator tersebut telah memenuhi target capaian dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75	93,58	124,77 %	Pengawasan yang intensif terhadap pelaku usaha memberikan dampak kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal sehingga data realisasi investasi dapat terekap dengan baik	Memberikan kemudahan dan pengawalan kepada pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal berupa pendampingan implementasi OSS RBA dan Laporan LKPM, Penanugerahan pada ANVESTA, Forum Penyelesaian Masalah dan Pelaksanaan Bimtek Pelaku Usaha
						Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap capaian indikator	

2	Mingkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	91,12	110,45 %	Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap capaian indikator serta tindaklanjut hasil evaluasi	Pembinaan Petugas Layanan MPP dan Gerai Pelayanan Publik memberikan layanan informasi dan konsultasi penanaman modal
---	---	----------------------------	------	-------	----------	---	--

Sedangkat dari 41 (Empat Puluh Satu) Kinerja Kegiatan terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) indikator dibawah 80%, 2 (dua) masih dibawah target. Kedua indikator yang capaiannya dibawah target tersebut terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 76%;
2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 40,00%;

Ketidaktercapaian tersebut dikarenakan kegiatan layanan pengaduan merupakan layanan berdasarkan keperluan penerima layanan, untuk pemberian insentif dikarekan belum tersedianya Perda terkait.

Jika kita telaah lebih lanjut, ketidakcapaian terkait anggaran merupakan efesiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan terdapat pembiayaan yang akan menjadi beban pada Tahun 2024.

2. Saran

1. Berdasarkan hasil perolehan capaian kinerja Tahun 2023 perlu kiranya DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melakukan evaluasi kinerja serta mereviu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

serta peningkatan kinerja yang telah diperjanjikan untuk periode pelaporan kedepannya.

2. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan agar setiap pegawai dapat melaksanakan program sesuai dengan perencanaan dan mereviu kegiatan sehingga dapat tercapai kegiatan yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Purwakarta, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013